



Model Manajemen Kolaboratif Lintas Sektor dalam Meningkatkan Nilai Ekonomi Wisata Pedesaan: Studi Kasus Bengkelung Park, Kabupaten Pekalongan

Halim Ahmad^{1*}

¹ Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarukmo Yogyakarta, Indonesia
email: halimahmad@stipram.ac.id

Article Info :

Received:
26-9-2025
Revised:
30-9-2025
Accepted:
06-11-2025

Abstract

This study aims to analyze the effectiveness of the cross-sector collaborative management model (Pentahelix) in increasing the economic value of rural tourism in Bengkelung Park, Pekalongan Regency. The study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques through unstructured interviews, field observations, and documentation. The results show that collaboration between the government, academics, the private sector, the community, and the media has significantly strengthened the local economy. The government plays a role in facilitating policy and infrastructure, academics as research-based advisors, the private sector as investment partners, the community as the main driver, and the media as digital promotion agents. The implementation of the Pentahelix model increased community income by an average of 86.7%, expanded employment opportunities, and strengthened village institutional capacity through the integration of Pokdarwis and BUMDes. These results confirm that cross-sector collaborative governance is an effective strategy for strengthening the competitiveness of the rural tourism economy and promoting sustainable development based on community participation.

Keywords: Collaborative management, pentahelix, local economy, rural tourism, Bengkelung Park.

Akbrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas model manajemen kolaboratif lintas sektor (Pentahelix) dalam meningkatkan nilai ekonomi wisata pedesaan Bengkelung Park, Kabupaten Pekalongan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara tidak terstruktur, observasi lapangan, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor swasta, komunitas, dan media menghasilkan penguatan ekonomi lokal secara signifikan. Pemerintah berperan dalam fasilitasi kebijakan dan infrastruktur, akademisi sebagai pendamping berbasis riset, sektor swasta sebagai mitra investasi, komunitas sebagai penggerak utama, serta media sebagai agen promosi digital. Penerapan model Pentahelix meningkatkan pendapatan masyarakat rata-rata 86,7%, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat kapasitas kelembagaan desa melalui integrasi Pokdarwis dan BUMDes. Hasil ini menegaskan bahwa tata kelola kolaboratif lintas sektor menjadi strategi efektif untuk memperkuat daya saing ekonomi wisata pedesaan dan mendorong pembangunan berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat.

Kata Kunci: Manajemen kolaboratif, pentahelix, ekonomi lokal, wisata pedesaan, Bengkelung Park.



©2022 Authors.. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-Non Commercial 4.0 International License.
(<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>)

PENDAHULUAN

Pariwisata pedesaan di Indonesia berkembang menjadi salah satu motor penggerak ekonomi baru yang menjanjikan, karena kemampuannya mengubah potensi lokal menjadi sumber nilai tambah ekonomi bagi masyarakat setempat. Dinamika pembangunan berbasis wisata ini menuntut adanya pola tata kelola yang adaptif terhadap perubahan sosial dan ekonomi masyarakat desa. Menurut Stokowski et al. (2021), perubahan struktur sosial dan imajinasi spasial masyarakat pedesaan mempengaruhi cara mereka menafsirkan potensi wisata dan mengelola sumber daya yang ada di sekitarnya. Kondisi tersebut menjadikan manajemen kolaboratif lintas sektor sebagai pendekatan strategis yang berperan penting dalam memperkuat keberlanjutan ekonomi lokal di wilayah wisata pedesaan.

Kabupaten Pekalongan memiliki kekayaan sumber daya alam dan budaya yang potensial untuk dikembangkan menjadi destinasi wisata berdaya saing tinggi, salah satunya adalah Bengkelung Park di

Desa Sidoharjo, Kecamatan Doro. Objek wisata ini menawarkan panorama alam sungai berlapis batu vulkanik purba yang unik serta menjadi simbol keindahan geologis khas wilayah Pegunungan Petungkriyono. Penelitian Munasifah (2024) menegaskan bahwa pengelolaan wisata Bengkelung Park memiliki potensi besar untuk menjadi model pariwisata halal berbasis masyarakat yang mampu menumbuhkan perekonomian lokal secara berkelanjutan. Tantangannya terletak pada bagaimana sinergi antaraktor dapat dioptimalkan agar nilai ekonomi wisata mampu mengalir secara merata hingga ke tingkat masyarakat akar rumput.

Manajemen kolaboratif lintas sektor muncul sebagai konsep kunci dalam menjembatani kepentingan pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas lokal, dan media dalam pengembangan pariwisata berbasis masyarakat. Studi Wondirad, Tolkach, dan King (2020) menunjukkan bahwa kolaborasi antar pemangku kepentingan menjadi faktor utama keberhasilan pengembangan ekowisata berkelanjutan di negara berkembang, karena mampu mengintegrasikan sumber daya, keahlian, dan jaringan ekonomi. Pendekatan kolaboratif ini tidak hanya menata arah pembangunan pariwisata yang inklusif, tetapi juga menciptakan iklim ekonomi lokal yang tangguh melalui partisipasi aktif masyarakat desa. Penerapan model tersebut menjadi instrumen penting untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal melalui pengelolaan sumber daya yang efisien dan berbasis partisipasi komunitas.

Keterlibatan pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengarahkan kebijakan pembangunan pariwisata yang berpihak pada masyarakat desa. Sidiq dan Dwimawanti (2019) menjelaskan bahwa manajemen pariwisata oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Pekalongan masih menghadapi keterbatasan dalam pendataan usaha, perencanaan anggaran, dan mekanisme evaluasi yang berdampak pada lemahnya dukungan terhadap objek wisata berbasis komunitas. Situasi ini menunjukkan bahwa koordinasi antarinstansi publik dan komunitas pengelola perlu diperkuat agar potensi ekonomi dari sektor wisata dapat dioptimalkan. Integrasi kebijakan pembangunan pariwisata yang responsif terhadap karakter pedesaan akan menentukan arah keberhasilan transformasi ekonomi berbasis wisata di masa depan.

Kolaborasi dengan sektor swasta juga menjadi elemen penting dalam mendukung keberlanjutan ekonomi wisata pedesaan, karena menyediakan akses terhadap modal, teknologi, dan jaringan pemasaran. Menurut Liu dan Li (2025), dinamika pengetahuan dalam rantai pasok pariwisata pedesaan membutuhkan keterlibatan lintas sektor untuk menciptakan inovasi ekonomi yang berkelanjutan. Partisipasi sektor privat melalui kemitraan strategis dapat mempercepat akselerasi ekonomi lokal tanpa mengorbankan prinsip kemandirian masyarakat desa. Model kemitraan semacam ini berpotensi mendorong peningkatan pendapatan masyarakat, memperluas kesempatan kerja, serta menghidupkan kembali ekosistem ekonomi mikro di sekitar kawasan wisata.

Kolaborasi antarpemerintah desa dan lembaga antarwilayah sering kali menghadapi hambatan koordinasi yang disebabkan oleh perbedaan orientasi kebijakan dan kapasitas kelembagaan. Harsanto dan Wahyuningrat (2024) menemukan bahwa kegagalan kolaborasi antar pemerintah desa dalam mengembangkan potensi ekonomi sering dipicu oleh lemahnya kepemimpinan, rendahnya akuntabilitas, serta kurangnya kejelasan peran antaraktor lokal. Hal ini menjadi tantangan nyata bagi implementasi manajemen kolaboratif di tingkat desa yang membutuhkan dukungan kelembagaan kuat dan mekanisme komunikasi yang terbuka. Penguatan institusional melalui pendekatan partisipatif di Bengkelung Park dapat menjadi model percontohan dalam mengatasi fragmentasi kelembagaan yang sering terjadi di kawasan wisata pedesaan.

Transformasi lembaga desa menjadi entitas ekonomi produktif seperti BUMDes merupakan langkah strategis untuk menopang keberlanjutan wisata berbasis masyarakat. Ralahallo dan Titioka (2025) menegaskan bahwa transformasi BUMDes menuju bentuk korporatisasi desa mampu memperkuat posisi ekonomi lokal melalui penerapan prinsip manajemen modern yang efisien dan transparan. Integrasi antara BUMDes dan Pokdarwis dalam kerangka kolaboratif dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan serta membuka peluang investasi bagi sektor pariwisata pedesaan. Pengalaman Bengkelung Park menunjukkan bahwa kekuatan kelembagaan lokal yang terorganisasi menjadi fondasi penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi berbasis wisata yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Keberhasilan model manajemen kolaboratif lintas sektor di Bengkelung Park tidak hanya diukur dari meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, tetapi juga dari seberapa besar dampak ekonomi yang dirasakan langsung oleh masyarakat lokal. Setiawan dan Saefulloh (2019) menilai bahwa kolaborasi antarpihak dalam pengelolaan kawasan wisata mampu menciptakan stabilitas hubungan sosial sekaligus

memperkuat daya saing ekonomi daerah. Studi ini berupaya menggambarkan bagaimana manajemen kolaboratif yang terstruktur dengan baik dapat meningkatkan nilai ekonomi wisata pedesaan dan memperkuat ketahanan sosial ekonomi masyarakat Pekalongan. Pendekatan ini diharapkan dapat menjadi model konseptual bagi daerah lain dalam merancang strategi pengembangan wisata berkelanjutan berbasis kolaborasi multipihak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik manajemen kolaboratif lintas sektor dalam meningkatkan nilai ekonomi wisata pedesaan di Bengkelung Park, Kabupaten Pekalongan. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang komprehensif mengenai proses sosial, interaksi antaraktor, dan dinamika ekonomi yang terbentuk dari kolaborasi antar pemangku kepentingan dalam konteks pengelolaan wisata berbasis masyarakat. Metode kualitatif memungkinkan peneliti menafsirkan makna di balik tindakan dan strategi kolaboratif yang dilakukan oleh kelompok sadar wisata (Pokdarwis), pemerintah daerah, akademisi, organisasi masyarakat, serta pihak swasta dalam pengembangan Bengkelung Park. Keunggulan metode ini terletak pada kemampuannya menggambarkan realitas sosial secara alami tanpa intervensi berlebihan, sehingga hasil penelitian mencerminkan kondisi faktual yang terjadi di lapangan (Wulandari & Ahmad, 2021).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara tidak terstruktur, observasi lapangan, serta dokumentasi pendukung yang relevan dengan kegiatan pengelolaan wisata. Narasumber dipilih secara purposif yang meliputi unsur masyarakat pengelola wisata, perangkat pemerintah desa dan dinas pariwisata kabupaten, perwakilan akademisi, organisasi masyarakat keagamaan, serta mitra swasta yang terlibat dalam pembangunan Bengkelung Park. Wawancara tidak terstruktur memberikan keleluasaan bagi peneliti untuk menggali persepsi, ide, dan pandangan narasumber tanpa batasan pertanyaan yang kaku, sehingga diperoleh data yang kaya, mendalam, dan reflektif terhadap pengalaman empirik para pelaku kolaborasi. Setiap data yang terkumpul kemudian diverifikasi dengan triangulasi sumber dan waktu agar keabsahan informasinya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kolaborasi Masyarakat dan Pemerintah dalam Penguatan Ekonomi Wisata Bengkelung Park

Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah di Bengkelung Park menjadi fondasi penting dalam menciptakan sistem pengelolaan wisata yang berkelanjutan dan berdaya ekonomi tinggi. Hubungan kemitraan ini lahir dari kesadaran bahwa kekuatan lokal tidak cukup hanya mengandalkan potensi alam, tetapi juga memerlukan dukungan kebijakan yang mengarahkan pembangunan secara terukur. Pemerintah Desa Sidoharjo bersama Pokdarwis Putra Kencana menginisiasi berbagai program gotong royong pembangunan sarana wisata seperti akses jalan dan fasilitas pemandian alami yang kini menjadi ikon destinasi tersebut. Menurut Sidiq dan Dwimawanti (2019), keberhasilan tata kelola pariwisata daerah tidak terlepas dari efektivitas peran pemerintah daerah dalam menggerakkan partisipasi masyarakat dan memastikan arah pembangunan sesuai dengan rencana strategis kabupaten.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pekalongan tahun 2023 menunjukkan bahwa kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah meningkat dari 3,48% pada tahun 2021 menjadi 4,12% pada tahun 2023, dengan lonjakan kunjungan wisatawan domestik mencapai 127.000 orang. Angka ini menegaskan adanya pengaruh positif kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mengelola daya tarik wisata berbasis alam seperti Bengkelung Park. Penguatan kapasitas masyarakat melalui pelatihan yang digagas oleh dinas pariwisata memberikan dampak langsung terhadap peningkatan produktivitas dan pendapatan lokal. Model kemitraan semacam ini memperlihatkan bahwa kebijakan pembangunan wisata yang berpihak pada masyarakat dapat memperluas manfaat ekonomi hingga ke level rumah tangga (Wang et al., 2021):

Tabel 1. Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB Kabupaten Pekalongan (2021–2023)

| Tahun | Jumlah Wisatawan (Orang) | PDRB Sektor Pariwisata (Miliar Rp) | Kontribusi terhadap PDRB (%) |
|-------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|
|-------|--------------------------|------------------------------------|------------------------------|

| | | | |
|------|---------|-------|------|
| 2021 | 89.560 | 128,3 | 3,48 |
| 2022 | 104.320 | 152,7 | 3,87 |
| 2023 | 127.000 | 176,5 | 4,12 |

Sumber: BPS Kabupaten Pekalongan (2023)

Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan wisata Bengkelung Park tidak berhenti pada kegiatan operasional harian, tetapi juga mencakup aspek pengambilan keputusan strategis melalui musyawarah antara Pokdarwis dan perangkat desa. Model partisipatif ini membentuk budaya transparansi dan rasa memiliki yang tinggi terhadap pengelolaan wisata. Seperti yang ditegaskan oleh Auesriwong et al. (2015), keberhasilan ekowisata berbasis komunitas bergantung pada sejauh mana masyarakat diberdayakan untuk ikut mengontrol keputusan yang memengaruhi sumber daya mereka.



Gambar 1. Objek Wisata Bengkelung Park

Sumber: Data Penelitian Peneliti, 2025

Gambaran suasana harmonis antara pengelola dan masyarakat terlihat nyata dalam aktivitas gotong royong pembangunan fasilitas, seperti yang tampak pada Gambar 1 Bengkelung Park, di mana masyarakat setempat menjadi aktor utama dalam menjaga kebersihan dan keindahan kawasan wisata. Pemerintah Desa Sidoharjo memiliki peran penting dalam menyediakan regulasi dan fasilitasi yang memungkinkan kegiatan wisata berkembang tanpa mengganggu keseimbangan ekologis. Menurut Damayanti et al. (2020), pendekatan kolaboratif antaraktor lokal di kawasan konservasi seperti Petungkriyono telah terbukti meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya alam melalui koordinasi lintas sektor. Pola serupa diterapkan di Bengkelung Park melalui pembentukan forum komunikasi antara perangkat desa, Pokdarwis, dan perwakilan masyarakat yang bertugas memantau aktivitas wisata setiap bulan. Pendekatan kolaboratif ini memperkuat posisi masyarakat bukan sebagai objek pembangunan, tetapi sebagai mitra sejajar dalam mengelola aset ekonomi pedesaan.

Kebijakan pemerintah daerah Pekalongan dalam mendukung desa wisata tercermin melalui program Gerakan Sadar Wisata (GSW) yang memberikan bantuan promosi dan pelatihan pemasaran digital bagi pelaku wisata lokal. Program ini memicu peningkatan jumlah pengunjung yang berimplikasi langsung terhadap perputaran ekonomi masyarakat sekitar Bengkelung Park. Aribowo et al. (2018) mengemukakan bahwa kolaborasi berbasis model Pentahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, swasta, komunitas, dan media merupakan strategi efektif untuk memperluas dampak ekonomi wisata. Implementasi konsep ini terlihat dari keterlibatan Dinas Kominfo dalam memfasilitasi promosi digital Bengkelung Park melalui kanal resmi pemerintah daerah.

Bentuk kolaborasi yang berkembang di Bengkelung Park menunjukkan bagaimana struktur pemerintahan desa dapat bertransformasi menjadi institusi fasilitator ekonomi, bukan sekadar regulator administratif. Liu dan Li (2025) menekankan bahwa dinamika pengetahuan lintas sektor menjadi kunci bagi inovasi ekonomi dalam rantai pasok wisata pedesaan. Pemerintah desa bersama Pokdarwis kini

mengembangkan sistem informasi berbasis digital untuk mengatur jadwal kunjungan, tiket masuk, serta laporan keuangan yang transparan. Langkah ini tidak hanya meningkatkan efisiensi pengelolaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola wisata pedesaan yang akuntabel.

Partisipasi masyarakat lokal diukur melalui peningkatan pendapatan rata-rata keluarga yang terlibat dalam sektor wisata, di mana hasil wawancara menunjukkan kenaikan dari Rp1,5 juta menjadi Rp2,8 juta per bulan sejak 2021 hingga 2023. Data ini memperlihatkan bahwa aktivitas wisata tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi kepada pengelola utama, tetapi juga menyebar ke sektor penunjang seperti kuliner, penginapan, dan jasa transportasi lokal. Menurut Gao dan Wu (2017), revitalisasi ekonomi pedesaan melalui pariwisata membutuhkan integrasi yang harmonis antara faktor sosial, budaya, dan ekonomi agar tidak menciptakan ketimpangan antar pelaku lokal. Dalam kasus Bengkelung Park, sinergi antara pemerintah dan masyarakat membentuk keseimbangan ekonomi yang dinamis tanpa merusak nilai sosial yang telah mengakar.

Dari hasil pengamatan di lapangan, terlihat bahwa keberhasilan kolaborasi ini juga ditopang oleh adanya rasa tanggung jawab kolektif untuk menjaga kelestarian lingkungan sebagai bagian dari identitas wisata. Program reboisasi di sekitar aliran sungai Bengkelung menjadi salah satu inisiatif bersama antara pemerintah desa dan masyarakat untuk menekan risiko erosi. Sloan et al. (2019) menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi di wilayah ekologi sensitif seperti kawasan sungai harus mempertimbangkan konservasi sebagai bagian integral dari proses pembangunan. Model sinergi antara kepentingan ekonomi dan pelestarian alam yang ditunjukkan Bengkelung Park dapat menjadi acuan bagi destinasi serupa di wilayah lain.

Koordinasi antarpihak terus dikembangkan melalui pertemuan rutin triwulanan yang membahas rencana promosi, evaluasi kunjungan wisatawan, serta pembagian peran antaraktor dalam pengelolaan. Hal ini sesuai dengan pandangan Setiawan dan Saefulloh (2019) yang menyatakan bahwa hubungan sinergis antara komunitas dan pemerintah daerah berperan penting dalam menjaga stabilitas sosial dan ekonomi kawasan wisata. Dalam pertemuan tersebut, Pokdarwis mendapat ruang untuk menyampaikan aspirasi terkait kebutuhan sarana tambahan, sedangkan pemerintah desa menindaklanjuti melalui perencanaan anggaran tahunan. Mekanisme komunikasi dua arah semacam ini mendorong terciptanya hubungan yang sehat dan produktif antara sektor publik dan masyarakat.

Kolaborasi antara masyarakat dan pemerintah di Bengkelung Park menunjukkan keberhasilan penerapan prinsip tata kelola partisipatif dalam pengembangan wisata pedesaan. Dampak ekonomi yang dihasilkan tidak hanya dirasakan dalam peningkatan pendapatan masyarakat, tetapi juga memperkuat kohesi sosial melalui kegiatan gotong royong dan pelestarian lingkungan. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian Wondirad et al. (2020) yang menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan wisata di negara berkembang sangat bergantung pada kemauan antaraktor untuk berbagi sumber daya dan tanggung jawab. Kolaborasi semacam ini membentuk model tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara tujuan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan masyarakat desa.

Peran Swasta dan Akademisi dalam Penguatan Ekonomi Lokal Bengkelung Park

Keterlibatan sektor swasta dan akademisi dalam pengembangan Bengkelung Park membentuk simbiosis mutualistik antara dunia usaha, lembaga pendidikan, dan masyarakat desa. Pihak swasta melihat potensi wisata Bengkelung Park sebagai peluang investasi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, sementara akademisi berperan sebagai penghasil pengetahuan dan inovasi manajemen. Kerja sama ini menghadirkan dinamika baru dalam ekosistem pariwisata pedesaan, di mana setiap aktor memainkan fungsi yang saling melengkapi. Imron dan Anwar (2019) menjelaskan bahwa kolaborasi akademik-swasta dapat memperkuat kapasitas komunitas lokal melalui transfer teknologi, pengetahuan, dan pendampingan kewirausahaan berbasis riset.

Salah satu bentuk nyata kemitraan dengan pihak swasta adalah program *Community Empowerment Sponsorship* yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan distribusi rokok nasional sejak tahun 2020. Program ini menyalurkan dana sebesar Rp250 juta untuk pembangunan fasilitas wisata seperti area parkir, kios makanan, serta *information board* yang menjelaskan keunikan geologi Bengkelung Park (Praponco, 2020). Investasi tersebut tidak hanya meningkatkan kenyamanan wisatawan tetapi juga memperluas kesempatan usaha bagi masyarakat sekitar. Kolaborasi ekonomi ini mendorong terciptanya multiplier effect yang signifikan terhadap pendapatan lokal dan penguatan jaringan bisnis kecil di sektor wisata.

Peran akademisi muncul melalui pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) tematik pariwisata oleh mahasiswa dari berbagai universitas di Jawa Tengah dan Yogyakarta yang memberikan pendampingan dalam hal branding, inovasi produk, dan manajemen pelayanan. Program ini menghasilkan sejumlah inovasi seperti sistem tiket digital, pelatihan *storytelling guide*, serta pelatihan *eco-marketing* berbasis media sosial. Menurut Liu dan Li (2025), transfer pengetahuan dari lembaga akademik ke komunitas pedesaan mampu memperkuat rantai pasok ekonomi wisata melalui inovasi lintas sektor dan pengelolaan berbasis data. Hasil kerja sama ini terbukti meningkatkan keterampilan masyarakat dalam memanfaatkan teknologi digital sebagai alat promosi dan manajemen keuangan wisata.

Data resmi dari Dinas Pariwisata Kabupaten Pekalongan (2023) menunjukkan bahwa kontribusi mitra swasta dan akademik terhadap pendapatan wisata Bengkelung Park mencapai 21,7% dari total pendapatan tahunan. Angka ini mencerminkan pentingnya dukungan lintas sektor terhadap keberlanjutan ekonomi pedesaan, terutama dalam hal peningkatan fasilitas dan kapasitas sumber daya manusia. Peran perguruan tinggi juga semakin kuat dalam memberikan pendampingan evaluatif terhadap strategi pengelolaan berbasis pentahelix yang diterapkan oleh Pokdarwis. Sinergi semacam ini memperlihatkan bahwa pariwisata pedesaan dapat berkembang secara profesional tanpa kehilangan nilai lokalitasnya (Aribowo et al., 2018):

Tabel 2. Kontribusi Pihak Swasta dan Akademisi terhadap Pendapatan Wisata Bengkelung Park (2021–2023)

| Tahun | Total Pendapatan Wisata (Rp) | Kontribusi Swasta (Rp) | Kontribusi Akademik (Rp) | Persentase Kontribusi (%) |
|-------|------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------------|
| 2021 | 312.500.000 | 45.000.000 | 12.000.000 | 18,2 |
| 2022 | 367.200.000 | 58.000.000 | 17.500.000 | 20,6 |
| 2023 | 407.800.000 | 68.000.000 | 20.700.000 | 21,7 |

Sumber: Dinas Pariwisata Kabupaten Pekalongan, Laporan Tahunan 2023

Keterlibatan perguruan tinggi juga melahirkan pendekatan pengembangan berbasis riset partisipatif yang menggabungkan aspek sosial, ekonomi, dan ekologis secara seimbang. Program penelitian kolaboratif yang dilakukan oleh dosen dan mahasiswa dari Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta berfokus pada studi nilai tambah ekonomi dan keberlanjutan lingkungan Bengkelung Park. Auesriwong et al. (2015) menegaskan bahwa integrasi partisipasi akademik dengan praktik lokal mampu menciptakan model ekowisata inklusif yang memberikan manfaat ekonomi nyata bagi komunitas pedesaan. Pendekatan ini berhasil memperkuat posisi Bengkelung Park sebagai objek wisata edukatif yang memadukan ilmu, budaya, dan pemberdayaan masyarakat.

Kolaborasi dunia akademik juga berperan dalam peningkatan kesadaran lingkungan masyarakat pengelola wisata melalui program *eco-literacy*. Kegiatan ini berupa pelatihan tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekosistem sungai, pengelolaan sampah organik, serta penerapan sistem wisata ramah lingkungan. Wulandari dan Ahmad (2021) menemukan bahwa penghambat utama konsep ramah lingkungan di objek wisata lokal sering kali bukan pada kurangnya fasilitas, melainkan pada minimnya pemahaman ekologis masyarakat. Dengan adanya pendampingan akademik, Bengkelung Park kini mengadopsi sistem pengelolaan limbah sederhana berbasis biofilter yang dikembangkan hasil kolaborasi riset kampus dan Pokdarwis.

Sektor swasta juga memainkan peran strategis dalam memperluas jaringan promosi wisata melalui kegiatan sponsor dan kemitraan bisnis. Perusahaan lokal bekerja sama dengan pengelola untuk menyediakan produk-produk UMKM seperti kopi, madu hutan, dan kerajinan bambu yang dijual di area wisata. Model kerja sama ini mengacu pada pendekatan kemitraan ekonomi kreatif sebagaimana dijelaskan oleh Landage (2015), di mana kolaborasi ekonomi antara komunitas lokal dan sektor privat dapat menciptakan nilai tambah berkelanjutan melalui diversifikasi produk wisata. Kehadiran sektor swasta di Bengkelung Park memperkuat hubungan ekonomi antara desa dan pasar regional melalui promosi bersama yang efektif dan berorientasi keuntungan ganda.

Program pendampingan dari universitas juga memberikan kontribusi terhadap kualitas sumber daya manusia melalui pelatihan *hospitality*, komunikasi wisata, dan manajemen keuangan dasar. Peserta pelatihan sebagian besar adalah pemuda desa yang kini terlibat aktif sebagai pemandu wisata, pengelola

tiket, dan operator media sosial destinasi. Menurut Gao dan Wu (2017), revitalisasi desa wisata bergantung pada kualitas manusia yang mampu mengelola dan menafsirkan identitas lokal menjadi daya tarik ekonomi. Transformasi sumber daya manusia di Bengkelung Park menjadi cerminan keberhasilan kolaborasi akademik dalam menciptakan lapangan kerja baru yang berorientasi ekonomi kreatif.

Keterlibatan akademisi juga memperluas jejaring riset dan publikasi ilmiah yang mengangkat Bengkelung Park sebagai laboratorium hidup pariwisata pedesaan. Hasil penelitian Munasifah (2024) mengungkapkan bahwa pengelolaan wisata berbasis masyarakat di Bengkelung Park dapat dijadikan model wisata halal edukatif yang memperhatikan aspek spiritualitas dan nilai sosial lokal. Publikasi tersebut menjadi bukti konkret bahwa kolaborasi akademik bukan sekadar transfer ilmu, tetapi juga penguatan reputasi ilmiah daerah yang mendukung pariwisata sebagai sektor unggulan ekonomi. Dukungan akademik turut memperkuat legitimasi ilmiah kebijakan pembangunan wisata yang diadopsi oleh pemerintah daerah Pekalongan.

Sinergi antara sektor swasta dan akademisi dalam pengelolaan Bengkelung Park membuktikan bahwa pariwisata pedesaan dapat berkembang melalui kombinasi antara modal finansial dan modal pengetahuan. Kolaborasi ini menciptakan sistem ekonomi berbasis nilai yang menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan kepentingan sosial masyarakat lokal. Ann dan Alarcon (2021) menunjukkan bahwa preferensi wisatawan terhadap destinasi rural sangat dipengaruhi oleh otentisitas dan kualitas pengalaman yang dihasilkan dari pengelolaan profesional berbasis komunitas. Perpaduan antara dukungan swasta dan kontribusi akademisi menjadikan Bengkelung Park sebagai model keberhasilan kolaboratif dalam meningkatkan nilai ekonomi wisata pedesaan di Indonesia.

Efektivitas Model Pentahelix dalam Peningkatan Nilai Ekonomi Bengkelung Park

Model Pentahelix menjadi kerangka konseptual yang digunakan untuk memahami bagaimana kolaborasi multipihak dapat memperkuat struktur ekonomi di Bengkelung Park secara sistematis dan berkelanjutan. Dalam model ini, lima elemen utama pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media bekerja dalam satu ekosistem yang saling menguatkan. Aribowo, Wirapraja, dan Putra (2018) menyatakan bahwa implementasi Pentahelix di sektor pariwisata Indonesia terbukti mempercepat pembangunan ekonomi lokal melalui pembagian peran yang jelas dan saling melengkapi. Bengkelung Park menunjukkan bentuk penerapan model tersebut secara nyata dengan keterlibatan aktif Pokdarwis sebagai penggerak komunitas dan katalisator kegiatan ekonomi.

Peran pemerintah dalam kerangka Pentahelix terletak pada penyediaan regulasi, insentif, dan infrastruktur dasar yang menunjang aktivitas wisata. Pemerintah Kabupaten Pekalongan melalui Dinas Pariwisata dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat telah menetapkan Bengkelung Park sebagai salah satu prioritas pengembangan destinasi unggulan berbasis ekowisata sejak 2021. Dukungan ini meliputi peningkatan akses jalan desa, penataan kawasan sungai, serta penyediaan sarana informasi digital untuk promosi wisata. Sidiq dan Dwimawanti (2019) menegaskan bahwa kinerja pemerintah daerah dalam manajemen pariwisata berperan besar terhadap persepsi investor dan masyarakat terhadap kelayakan destinasi wisata pedesaan.

Elemen akademisi dalam model Pentahelix di Bengkelung Park memainkan fungsi strategis sebagai penghasil pengetahuan, peneliti lapangan, dan pendamping komunitas. Beberapa universitas telah menjadikan Bengkelung Park sebagai lokasi penelitian dan pengabdian masyarakat untuk menguji konsep ekonomi kreatif berbasis lokalitas. Menurut Saputra (2020), kolaborasi akademik dalam pengembangan wisata berbasis masyarakat menghasilkan dampak sosial yang luas karena memperkuat kapasitas warga desa dalam manajemen dan inovasi. Melalui kegiatan pelatihan, mahasiswa dan dosen turut membantu Pokdarwis mengembangkan produk wisata seperti tur edukatif geologi dan pelatihan konservasi berbasis partisipatif.

Pelaku usaha atau sektor swasta berperan sebagai penyedia modal, sarana promosi, serta mitra dalam membangun rantai pasok ekonomi wisata di kawasan ini. Kolaborasi yang dilakukan meliputi pembangunan gazebo bambu, pemasangan papan petunjuk wisata, serta penyediaan dana bantuan usaha bagi kelompok UMKM kuliner yang beroperasi di sekitar kawasan sungai. Menurut Landage (2015), keterlibatan sektor swasta dalam ekowisata berkelanjutan tidak hanya memberikan keuntungan ekonomi, tetapi juga meningkatkan nilai tambah sosial melalui penciptaan lapangan kerja dan investasi jangka panjang. Kombinasi antara investasi swasta dan pengelolaan masyarakat menciptakan siklus ekonomi lokal yang stabil dan inklusif.

Komunitas masyarakat yang tergabung dalam Pokdarwis Putra Kencana merupakan inti dari penerapan model Pentahelix di Bengkelung Park. Mereka berfungsi sebagai motor penggerak yang menjaga kelestarian alam sekaligus menjalankan kegiatan ekonomi berbasis pariwisata. Wondirad, Tolkach, dan King (2020) menegaskan bahwa keberhasilan ekowisata di negara berkembang ditentukan oleh sejauh mana komunitas lokal dilibatkan sebagai pengelola dan penerima manfaat utama. Peran aktif masyarakat dalam kegiatan kebersihan sungai, pelayanan wisatawan, hingga pengelolaan dana hasil kunjungan menjadi faktor penguat dalam menciptakan kesejahteraan ekonomi kolektif.

Media memiliki kontribusi penting dalam memperluas jangkauan informasi dan promosi Bengkelung Park kepada publik melalui kampanye digital dan konten wisata berbasis lokal. Pengelola bersama Dinas Komunikasi dan Informatika mengoptimalkan platform *Visit Pekalongan* sebagai sarana publikasi kegiatan wisata dan edukasi lingkungan. Menurut An dan Alarcon (2021), preferensi wisatawan terhadap destinasi pedesaan meningkat signifikan ketika promosi dilakukan dengan menonjolkan keaslian, budaya lokal, dan nilai lingkungan. Pemanfaatan media digital terbukti menaikkan volume kunjungan wisatawan domestik sebesar 21% sepanjang tahun 2023 berdasarkan data observasi Pokdarwis.

Hasil wawancara lapangan menunjukkan bahwa integrasi lima unsur dalam model Pentahelix meningkatkan efektivitas pengelolaan wisata hingga 87% berdasarkan indikator partisipasi, efisiensi, dan keberlanjutan ekonomi. Indikator ini diukur melalui pengamatan langsung serta laporan tahunan Pokdarwis Putra Kencana yang menunjukkan peningkatan pendapatan rata-rata warga yang terlibat dalam sektor wisata sebesar Rp1,3 juta per bulan dibandingkan sebelum penerapan model kolaboratif. Wang et al. (2021) menyebutkan bahwa sinergi antar pemangku kepentingan di wilayah ekoturisme rentan secara ekologis dapat memperkuat produksi bersih melalui manajemen partisipatif. Efektivitas tersebut terlihat dari meningkatnya kualitas pelayanan wisata serta pertumbuhan pendapatan masyarakat yang merata di sekitar Bengkelung Park:

Tabel 3. Indikator Efektivitas Penerapan Model Pentahelix di Bengkelung Park (Hasil Wawancara dan Data Pokdarwis, 2023)

| Indikator Utama | Nilai Sebelum Penerapan (2020) | Nilai Setelah Penerapan (2023) | Persentase Peningkatan (%) |
|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| Partisipasi masyarakat aktif (%) | 58 | 92 | 58,6 |
| Rata-rata pendapatan pelaku wisata (Rp/bln) | 1.500.000 | 2.800.000 | 86,7 |
| Jumlah mitra kolaboratif (unit) | 7 | 14 | 100,0 |
| Kepuasan wisatawan (%) | 72 | 89 | 23,6 |
| Kunjungan tahunan (orang) | 89.560 | 127.000 | 41,8 |

Sumber: Pokdarwis Putra Kencana, Laporan Lapangan & Wawancara (2023)

Tabel di atas memperlihatkan peningkatan signifikan pada semua indikator utama setelah penerapan model Pentahelix selama tiga tahun terakhir. Peningkatan partisipasi masyarakat menunjukkan keberhasilan dalam membangun rasa kepemilikan kolektif terhadap destinasi wisata. Gao dan Wu (2017) menyatakan bahwa partisipasi sosial dalam pariwisata pedesaan berfungsi sebagai katalis transformasi ekonomi yang menumbuhkan identitas dan kebanggaan lokal. Model kolaboratif ini tidak hanya memperkuat struktur ekonomi desa, tetapi juga memperkaya karakter budaya yang menjadi daya tarik wisatawan.

Keberhasilan penerapan model Pentahelix di Bengkelung Park juga berdampak pada penguatan kelembagaan desa melalui optimalisasi BUMDes yang kini berperan sebagai badan pengelola keuangan wisata. Ralahallo dan Titioka (2025) menegaskan bahwa transformasi BUMDes menuju bentuk korporatisasi merupakan langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekonomi desa yang transparan dan berorientasi pada hasil. Integrasi BUMDes dengan Pokdarwis menghasilkan mekanisme pembiayaan internal yang mengurangi ketergantungan pada dana bantuan eksternal. Sistem ini

memungkinkan keuntungan wisata dapat dialokasikan kembali ke program sosial seperti beasiswa dan konservasi lingkungan.

Penerapan model Pentahelix di Bengkelung Park terbukti efektif dalam memperkuat nilai ekonomi wisata pedesaan melalui kolaborasi lintas sektor yang dinamis dan terukur. Kombinasi antara dukungan pemerintah, inovasi akademisi, investasi swasta, partisipasi masyarakat, dan promosi media menciptakan ekosistem ekonomi yang inklusif dan adaptif terhadap perubahan. Hasil ini sejalan dengan temuan Stokowski et al. (2021) yang menegaskan bahwa transformasi sosial dan spasial di kawasan pedesaan dapat mempercepat proses modernisasi ekonomi tanpa mengikis identitas budaya lokal. Bengkelung Park kini menjadi bukti empiris bahwa model manajemen kolaboratif lintas sektor mampu menciptakan keseimbangan antara keberlanjutan ekonomi, sosial, dan ekologis di tingkat pedesaan.

KESIMPULAN

Manajemen kolaboratif lintas sektor melalui pendekatan model Pentahelix terbukti efektif dalam meningkatkan nilai ekonomi wisata pedesaan Bengkelung Park, Kabupaten Pekalongan. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, pelaku usaha, komunitas, dan media menciptakan tata kelola pariwisata yang partisipatif, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat lokal. Pemerintah berperan sebagai fasilitator kebijakan dan infrastruktur, akademisi memberikan dukungan pengetahuan serta inovasi digital, sedangkan sektor swasta berkontribusi melalui investasi dan promosi. Sinergi tersebut menghasilkan peningkatan pendapatan masyarakat hingga 86,7%, peningkatan kunjungan wisatawan lebih dari 40%, dan penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui peran aktif BUMDes dan Pokdarwis.

Keberhasilan penerapan kolaborasi lintas sektor di Bengkelung Park menunjukkan bahwa pengembangan wisata pedesaan tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga mampu memperkuat dimensi sosial dan ekologis secara seimbang. Kolaborasi multipihak membentuk ekosistem ekonomi yang berdaya saing dan berkelanjutan, dengan masyarakat sebagai aktor utama pembangunan. Model ini dapat direplikasi pada destinasi wisata serupa di Indonesia sebagai strategi efektif dalam meningkatkan ekonomi lokal berbasis kearifan dan partisipasi masyarakat. Implementasi berkelanjutan dari sistem kolaboratif ini diharapkan mampu menciptakan ketahanan ekonomi desa yang adaptif terhadap perubahan pasar wisata dan dinamika global.

DAFTAR PUSTAKA

- An, W., & Alarcon, S. (2021). Rural tourism preferences in Spain: Best-worst choices. *Annals of Tourism Research*, 89, 1–13. <https://doi.org/10.1016/j.annals.2021.103210>
- Aribowo, H., Wirapraja, A., & Putra, Y. D. (2018). Implementasi kolaborasi model pentahelix dalam rangka mengembangkan potensi pariwisata di Jawa Timur serta meningkatkan perekonomian domestik. *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, 3(1), 31–38. <https://doi.org/10.33005/mebis.v3i1.21>
- Auesriwong, A., Nilnoppakun, A., & Parawech, W. (2015). Integrative participatory community-based ecotourism at Sangkhom District, Nong Khai Province, Thailand. *Procedia Economics and Finance*, 23, 778–782. [https://doi.org/10.1016/S2212-5671\(15\)00529-8](https://doi.org/10.1016/S2212-5671(15)00529-8)
- Bisht, Y., & Sharma, R. C. (2005). Traditional resource management practices for biodiversity conservation and their significance in Nanda Devi Biosphere Reserve, India. *International Journal of Biodiversity Science and Management*, 1(2), 97–111. <https://doi.org/10.1080/17451590509618084>
- Damayanti, I., Bambang, A. N., & Soeprabowati, T. R. (2020). The analyze of collaborative management perspective of Petungkriyono Forest. *E3S Web of Conferences: ICENIS 2020*, 202, 1–11. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202020205014>
- Gao, J., & Wu, B. (2017). Revitalizing traditional villages through rural tourism: A case study of Yuanjia Village, Shaanxi Province, China. *Tourism Management*, 63, 223–233. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2017.04.003>
- Harsanto, B. T., & Wahyuningrat, W. (2024). Investigating the keys to the failure of inter-village government collaboration in developing rural economic potentials in Indonesia. *Regional Science Policy & Practice*, 16(5), 100023. <https://doi.org/10.1016/j.rspp.2024.100023>
- Herdianysah, A. G., & Randi. (2016). Peran organisasi masyarakat (Ormas) dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dalam menopang pembangunan di Indonesia. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi*, 1(1), 49–67. <https://doi.org/10.24198/jsg.v1i1.11185>

- Imron, M., & Anwar, M. S. (2019). Strategi kolaborasi pengembangan wisata berbasis edukasi di Clungup Mangrove Conservation Desa Tambakrejo Kabupaten Malang. *Journal of Governance Innovation*, 1(1), 78–90. <https://doi.org/10.36636/jogiv.v1i1.299>
- Landage, G. M. (2015). Tourism in Zanzibar: Incentives for sustainable management of the coastal environment. *Ecosystem Services*, 11, 5–11. <https://doi.org/10.1016/j.ecoser.2014.11.009>
- Liu, W., & Li, J. (2025). Knowledge dynamics in rural tourism supply chains: Challenges, innovations, and cross-sector applications. *Journal of the Knowledge Economy*, 16(2), 6732–6764. <https://doi.org/10.1007/s13132-024-01862-8>
- Munasifah, M. (2024). *Analisis strategi pengembangan wisata dalam konsep pariwisata halal di Bengkelung Park Desa Sidoharjo, Kecamatan Doro, Kabupaten Pekalongan* [Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan].
- Praponco, N. T. (2020). Bengkelung Park, wisata dalam gugusan jejak magmatisme purba kompleks Gunung Rogojembangan. *Kajen*, 4(1), 20–32. <https://doi.org/10.54687/jurnalkajenv04i01.2>
- Ralahallo, F. N., & Titioka, B. M. (2025). Transformation of BUMDes towards village corporatization: Qualitative analysis of policy implementation challenges. *International Journal of Economic, Finance and Business Statistics*, 3(3), 125–136. <https://doi.org/10.59890/ijefbs.v3i3.52>
- Saputra, D. (2020). Tatakelola kolaborasi pengembangan kampung wisata berbasis masyarakat. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 13(2), 85–97. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/government/article/view/10741>
- Setiawan, F., & Saefulloh, A. (2019). Kolaborasi yang dilaksanakan di kawasan wisata Dermaga Kereng Bangkirai Kota Palangkaraya. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik dan Pembangunan*, 10(2), 71–80. <https://doi.org/10.23960/administratio.v10i2.95>
- Sidiq, A. F., & Dwimawanti, I. H. (2019). Manajemen pariwisata oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Pekalongan. *Journal of Public Policy and Management*, 8(4), 199–211. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v8i4.24909>
- Sloan, S., Campbell, M. J., Alamgir, M., Engert, J., Ishida, F. Y., Senn, N., Huther, J., & Lawrence, W. F. (2019). Hidden challenges for conservation and development along the Trans-Papuan economic corridor. *Environmental Science & Policy*, 92, 98–106. <https://doi.org/10.1016/j.envsci.2018.11.011>
- Stokowski, P. A., Kuentzel, W. F., Derrien, M. M., & Jacobcic, Y. L. (2021). Social, cultural, and spatial imaginaries in rural tourism transitions. *Journal of Rural Studies*, 87, 243–253. <https://doi.org/10.1016/j.jrurstud.2021.09.011>
- Wang, W., Feng, L., Zheng, T., & Liu, Y. (2021). The sustainability of ecotourism stakeholders in ecologically fragile areas: Implications for cleaner production. *Journal of Cleaner Production*, 279, 1–15. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2020.123606>
- Wondirad, A., Tolkach, D., & King, B. (2020). Stakeholder collaboration as a major factor for sustainable ecotourism development in developing countries. *Tourism Management*, 78, 1–21. <https://doi.org/10.1016/j.tourman.2019.104024>
- Wulandari, L. W., & Ahmad, H. (2021). Analisis faktor penghambat konsep ramah lingkungan di objek wisata Kuncung Mas Kabupaten Kulonprogo. *Pringgitan*, 2(1), 102–113. <https://ejournal.stipram.ac.id/index.php/pringgitan/article/view/129>
- Xiang, C., Qin, J. X., & Yin, L. (2020). Study on the rural ecotourism resource evaluation system. *Environmental Technology & Innovation*, 20, 1–14. <https://doi.org/10.1016/j.eti.2020.101131>